

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA NEGERI 1 UTAN TAHUN 2019-2020

Edrial¹, Rangga Putrama A^{*2}, Ade Sujastiawan³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: rangga.P.99@yahoo.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: Mei 2022</i> <i>Revised: June 2022</i> <i>Published: 30 June 2022</i>	Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah bagi siswa kurang mampu dalam bentuk pemberian dana bantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. Menganalisa Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. Adapun hasil penelitian Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Utan apabila dikaitkan dengan kriteria efektivitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah, dari sisi efisiensi masih kurang efisien upaya yang dilakukan pelaksana memang sudah maksimal akan tetapi dalam pengelolaan anggaran masih belum efisien. Dari sisi pemerataan manfaat program masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran. Dari sisi responsivitas sudah baik. Dari sisi ketepatan program ini masih belum tepat, karena pelaksana tidak mendapat imbalan sepeserpun dalam menjalankan tugasnya. Adapun faktor pendukung implementasi PIP di SMA Negeri 1 Utan adalah adanya sumber daya peralatan yang baik sumberdaya terdapat buku panduan tentang kebijakan Program Indonesia Pintar dan kartu kontrol. Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat baik, hal ini membantu pemerintah desa dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan dan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Utan adalah distribusi Program yang belum merata, administrasi yang masih kurang
Keywords <i>Evaluasi Kebijakan;</i> <i>Program Indonesia Pintar;</i> <i>Implementasi Kebijakan;</i>	

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi menyebabkan salah satunya keterbatasan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak, padahal pendidikan sangat penting dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 26.580.000 juta orang atau 10,6 % dari total seluruh penduduk di Indonesia. Dalam *United Nations Development Programme* meliris Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada 2019 yaitu 0,694 berada pada peringkat 116 dari 188 negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tersebut dinilai masih cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang di ukur melalui dua indikator yaitu angka melek huruf (AMK) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dan upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui berbagai usaha seperti

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku pembelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan sistem manajemen sekolah. Namun, berbagai indikator mutu pendidikan masih cukup rendah. Salah satunya akibat dari rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok masyarakat miskin yang disebabkan tingginya biaya pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah biaya pendidikan mencapai sekitar 2,5 kali lipat dari biaya untuk jenjang dari pendidikan dasar. Sehingga keadaan tersebut tentunya sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin kejenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 : 1).

Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan nasional serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dimana pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan pemerintah menetapkan program perlindungan sosial, dimana salah satu dari program perlindungan sosial tersebut adalah Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP adalah bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir tahun 2014, pemberian bantuan berupa dana dari program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin atau rentan miskin akan layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dimana dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Besaran dana yang diberikan pemerintah kepada peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan besaran dana yaitu Rp.750.000,00. Dana bantuan dari Program Indonesia Pintar disalurkan langsung kepada peserta didik penerima bantuan.

Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan solusi dari pemerintah untuk dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah serta menekan angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan terhadap pemenuhan biaya pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Utan sampai saat ini masih ditemukan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar, evaluasi tersebut dilakukan untuk dapat mengukur atau menilai terkait sejauhmana suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini yaitu kebijakan Program Indonesia Pintar sebagai solusi dalam mengatasi masalah pendidikan khususnya keterbatasan terhadap akses pendidikan yang disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan.

Evaluasi PIP pada tingkat kabupaten/kecamatan untuk jenjang SMA dilakukan dengan mengamati dan menganalisis terkait prosedur atau mekanisme dari pelaksanaan PIP, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya untuk nantinya dapat memberikan informasi yang valid tentang hasil dari kebijakan, serta mencari solusi terhadap kritik atas nilai yang mendasari tujuan, target sasaran dan pelaksanaan dari kebijakan PIP. Dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai masalah sehingga membuat program ini belum dapat berjalan secara maksimal.

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar salah satunya yaitu masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana PIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP ini. Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Disisi lain masalah yang muncul dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Sejatinya

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out), dan menarik siswa putus sekolah (drop out) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Namun pada kenyataannya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA di Kecamatan Utan masih cukup tinggi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, kebijakan Program Indonesia Pintar dinilai masih belum berjalan sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri, dimana masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dari latar belakang tersebut penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Utan”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Di SMAN 1 Utan Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Utan Kabupaten Sumbawa

A. Efektifitas

Efektifitas kebijakan merupakan kriteria pertama dalam evaluasi kebijakan. Aspek penting dalam menilai efektifitas kebijakan didasarkan pada standar dan sasaran kebijakan serta ketepatan penerapan kedua hal tersebut. Standar dan sasaran merupakan variabel yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu kebijakan. Penegasan mengenai apa yang menjadi standar dan sasaran dari sebuah kebijakan akan menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan publik. Begitu pula dengan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini, para implementor atau pelaksana harus memahami standar dan sasaran dari program ini secara benar.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan apabila dikaitkan dengan kriteria efektivitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMA Negeri 1 Utan, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan juga berjalan sesuai dengan petunjuk teknis/prosedur yang telah ditetapkan dan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Utan mampu memberikan manfaat yang besar kepada kelompok sasaran yaitu dapat mengurangi beban biaya sekolah dan merubah pola pikir siswa menjadi lebih semangat untuk berprestasi di sekolah.

B. Efisiensi

Efisiensi biasanya dinyatakan ketika suatu kebijakan dinilai efektif dengan melihat proses atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana/penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dan pihak pelaksana sekolah. Pelaksana sekolah yaitu bapak Sofyan selaku staf tata usaha bidang kesiswaan sekaligus penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan telah memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran dan walimurid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh bapak Sofyan adalah penjarangan peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan yatim piatu. Proses penjarangan tersebut dilaksanakan pada awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berisi biodata siswa dan yang memiliki kartu bantuan sosial, kemudian bagi siswa yang memiliki kartu bantuan sosial seperti PKH, KKS, atau KIP di foto copy lalu dikumpulkan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan apabila dikaitkan dengan kriteria efisiensi maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri

1 Utan tersebut berjalan masih kurang efisien. Kurang efisien yaitu dalam segi upaya yang dilakukan pelaksana memang sudah maksimal akan tetapi dalam pengelolaan anggaran masih belum efisien. Hal tersebut dikarenakan proses pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) masih tidak tepat waktu, pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), dan aplikasi yang digunakan pelaksana yaitu aplikasi Dapodik masih terdapat kelemahan dalam mendeteksi siswa yang sudah lulus dari sekolah.

C. Kecukupan

Menurut Dunn (2003:430) “kecukupan (Adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah”. Kriteria kecukupan dalam evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu. Kebutuhan untuk sekolah setiap tahunnya naik akan tetapi jumlah bantuan yang diberikan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap.

Berdasarkan temuan peneliti dalam kriteria kecukupan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Kabupaten Sumbawa dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu, meskipun sikap pelaksana dianggap sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya.

D. Perataan

Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, memberikan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan dan pihak pelaksana sekolah meneruskan hasil sosialisasi tersebut kepada kelompok sasaran dan walimurid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sosialisasi tersebut dilakukan pada awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hasil temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan manfaat program masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran. Hal tersebut dapat terjadi karena Kartu Indonesia Pintar masih belum seluruhnya diberikan kepada kelompok sasaran, akan tetapi pihak pelaksana sudah melaksanakan indikator akuntabilitas dan transparansi dengan memberikan sosialisasi secara merata kepada kelompok sasaran dan menjelaskan bagaimana dana bantuan tersebut diberikan kepada kelompok sasaran.

E. Responsivitas

Dari sisi responsivitas upaya yang dilakukan oleh pelaksana di SMA Negeri 1 Utan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran, melakukan penjangkaran kepada kelompok sasaran dan rutin melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Pelaporan tersebut dilakukan setiap tahun pada saat diadakan rapat koordinasi. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan Program Indonesia

Pintar (PIP) apabila dihubungkan dengan kriteria responsivitas maka respon yang diberikan pihak pelaksana dan kelompok sasaran sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon positif yang diberikan oleh aparatur dan kelompok sasaran. Bukan hanya itu saja pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dan SMA Negeri 1 Utan juga sangat tanggap dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

F. Ketepatan

Dari hasil observasi penulis pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Kabupaten Sumbawa juga mengalami kendala dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu dari 215 siswa yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2020 hanya 20% atau sekitar 43 anak yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berikut Daftar Penerima PIP dalam tiga tahun terakhir ;

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2018-2019

A. Faktor pendukung

1) Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan salah faktor yang mendukung pelaksanaan PIP, diperlukan peralatan yang memadai seperti gedung dan komputer. Sarana pendukung dari pelaksanaan PIP di SMA Negeri 1 Utan yaitu berupa gedung dan juga laptop yang digunakan pada saat ada pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi PIP jika dilihat dari sumberdaya peralatan yaitu berupa gedung sudah mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain dari gedung dan laptop sebagai sarana pendukung, juga terdapat buku panduan tentang kebijakan Program Indonesia Pintar dan kartu kontrol. Sarana lainnya yang diberikan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan PIP yaitu diberikan buku panduan untuk memudahkan pelaksana dalam memberikan informasi. Dengan adanya kartu control ini juga dapat memudahkan orangtua siswa ketika membelanjakan dana yang sudah diterima.

2) Dukungan dari Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan tidak mengorbankan kepentingannya sendiri. Masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan kebijakan PIP. Secara prosedural orangtua siswa yang merasa memenuhi syarat penerima kartu indonesia pintar datang ke sekolah untuk melapor, lalu mereka melengkapi persyaratan untuk pendataan di kantor desa. Selain itu, orang tua juga meluangkan waktu datang ke kantor desa untuk memberi masukan agar penggunaan dana yang di berikan benar-benar tepat sasaran.

B. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2018-2019 adalah;

1) Distribusi PIP

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan manfaatnya belum dapat dirasakan oleh kelompok sasaran secara merata. Kelompok sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan pada tahun 2020 adalah sebanyak 217 anak, akan tetapi siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya 20% atau sekitar 43 anak saja (Dokumen bag.kesiswaan SMA Negeri 1 Utan). Kartu Indonesia Pintar (KIP) dicetak dan dikirim sejak tahun 2016, akan tetapi kenyataan di lapangan hingga tahun 2020 siswa masih banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Permasalahan yang terjadi bukan hanya itu saja, terdapat permasalahan lagi di SMA Negeri 1 Utan yaitu pada bulan Desember tahun 2020 pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) menerima sebanyak 77 Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut setelah dicek ternyata sebagian besar penerimanya adalah siswa yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Utan. Hal tersebut membuat pelaksana merasa kesulitan untuk memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pemiliknya.

2) Administrasi PIP

Kendala selanjutnya yang terjadi adalah ada seorang siswa kelas IX yang bernama Amanda memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), akan tetapi anak tersebut tidak menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) dari kelas VII, VIII dan IX di SMA Negeri 1 Utan. Hal tersebut dapat terjadi karena siswa tidak mengisi angket dan tidak mengumpulkan berkas pada saat awal masuk sekolah, sehingga Amanda tidak terdaftar sebagai kelompok sasaran. Penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan dalam mengatasi hal tersebut belum memberikan tindakan apapun. Hal tersebut dilakukan karena melihat kondisi siswa yang sudah kelas IX sehingga sebentar lagi lulus sekolah, bukan hanya itu saja untuk mengajukan siswa agar mendapat Program Indonesia Pintar (PIP) juga memakan waktu yang lama.

3) Pengawasan

Lemahnya pengawasan pasca pengambilan atau penarikan bantuan PIP membuat dana bantuan rawan untuk disalah gunakan. Uang bantuan Program Indonesia Pintar seyogianya diperuntukkan untuk pembelian uang sekolah dan perelengkapan sekolah pengawasan hendaknya dilakukan oleh aparat pemerintah desa, karena bagaimanapun pemerintah desa lah yang paling dekat dengan keluarga penerima PIP. Meskipun sejauh ini, secara spesifik di Kecamatan Utan masih belum ditemukan kasus penyalahgunaan bantuan PIP, namun menurut hemat penulis hendaknya pihak sekolah bekerjasama dengan pemerintah desa untuk membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penggunaan dana PIP.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Utan apabila dikaitkan dengan kriteria efektivitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMA Negeri 1 Utan, dari sisi efisiensi masih kurang efisien karena segi dalam segi upaya yang dilakukan pelaksana memang sudah maksimal akan tetapi dalam pengelolaan anggaran masih belum efisien. Dari sisi pemerataan manfaat program masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran. Dari sisi responsivitas upaya yang dilakukan oleh pelaksana di SMA Negeri 1 Utan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok sasaran, melakukan penjangkaran kepada kelompok sasaran dan rutin melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, program ini masih belum tepat, hal tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan masih belum tepat sasaran dan bagi pelaksana juga kurang mendapat manfaat karena tidak mendapat imbalan sepeserpun dalam menjalankan tugasnya.
2. Adapun faktor pendukung implementasi PIP di SMA Negeri 1 Utan adalah adanya sumber daya peralatan yang baik sumberdaya peralatan yaitu berupa laptop sudah mendukung untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal pengolahan data dan pemberian informasi kepada orang tua siswa. Selain dari gedung dan laptop sebagai sarana pendukung, juga terdapat buku panduan tentang kebijakan Program Indonesia Pintar dan kartu kontrol. Faktor pendukung lainnya adalah partisipasi masyarakat baik, hal ini membantu pemerintah desa dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan dan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Utan adalah distribusi Program yang belum merata, administrasi yang masih kurang baik, dan pengawasan dana bantuan yang masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Emzir, E. (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Nugraha, S., et al.(2005). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rakhmat, J. (1985). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remadja Karya.
- Utomo, W. (2003). *Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, S. A. (1992). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.